BAB III

REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GOLKAR DALAM PEMILU 2004

A. Keputusan Partai Golkar Mengenai Calon Anggota Legislatif Pemilu 2004

1. Strategi Partai Golkar

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh bahwa kemenangan partai Golkar di Kabupaten Indramayu dalam pemilu 2004 dengan sistem proporsional terbuka serta distrik adalah keyakinan dan kerja keras seluruh kader partai untuk melaksanakakan pertemuan-pertemuan internal yang telah diagendakan partai seperti rapat-rapat yang dilakukan oleh pengurus DPD tingkat II, kecamatan, hingga pengurus desa. Sedangkan konsolidasi adalah melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat serta seniman yang dilibatkan oleh pengurus DPD II partai Golkar guna pencalonan anggota legislatif. Karena partai menyadari bahwa keterlibatan calon anggota legislatif diluar kader Golkar hanya untuk meraih kemenangan. Karena dari tuduhan-tuduhan seperi partai Golkar adalah representasi kekuatan orde baru menjadi motivasi tersendiri kader partai untuk selalu berkoordinasi serta kosolidasi.

Dari narasumber yang didapat bahwa munculnya partai-partai baru disatu sisi sebagai lawan politik dan disisi lain bisa menjadi mitra untuk berkoalisi dalam parlement. Barangkali catatan disini pemilu 1999 partai Golkar berada pada urutan kedua. Walaupun demikian akhirnya kader

Golkar terpilih menjadi kepala eksekutif (bupati) berkat kerja sama diparlement (DPRD).

Disamping itu juga partai Golkar melihat permasalahan masyarakat dilapangan yang kemudian dijadikan kepada program pokok partai Golkar sejak musyawarah daerah (MUSDA) tingkat II yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Oktober 2004. Permasalahan masyarakat ini ditinjau secara ekonomi, budaya serta politik. Dengan kajian yang termaktub dalam program pokok partai Golkar harus dijadikan acuan para calon anggota legislatif yang terpilih nanti, dan harus bisa menjawab persoalan kemasyarakatan yang telah ada.

Dengan hal itu partai Golkar melihatnya ada dua strategi yang akan dimainkan dalam memperoleh suara pada pemilu 2004 nanti. Yaitu jangka menengah serta jangka panjang. Jangka menengah meliputi sistem pemilu 2004, munculnya partai-partai baru, dan masalah sosial, ekonomi, politik serta budaya. Sedangkan untuk jangka panjang adalah konsolidasi partai dan perluasan jaringan, kerjasama didalam parlement, materi untuk kebijakan para calon anggota legislatif. Untuk keterangan dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Pembacaan Situasi Partai Golkar
Menjelang Pemilu 2004

No.	Fokus Permasalahan	Jangka Menengah	Jangka Panjang	Keterangan
1.	Sistem Pemilu 2004	Sosialisasi Sistem Pemilu	Konsolidasi partai dan perluasan jaringan	Pertemuan dengan kader dan masyrakat
2.	Munculnya Partai-Partai Baru	Mitra Partai	Kerjasama di legislatif	Satu Platform
3.	Problem masyarakat sosial, ekonomi, dan politik	Pengkajian dalam materi kampanye	Materi kebijakan untuk calon anggota legislatif di DPRD	Untuk materi konvensi (temu caleg)

Sumber : Wawancara dengan wakil ketua DPD II Partai Golkar

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa strategi partai Golkar yaitu dengan melihat peluang opini yang berkembang dimasyarakat. Karena pembacaan situasinya tidak hanya memenangkan pemilu, tetapi lebih kepada proses dalam kerja politik. Sehingga input, proses dan out putnya terarah.

Input disini adalah masukan yang diperoleh untuk dijadikan sebagai bahan dalam pembahasan. Yang termasuk dalam input disini adalah hak inisiatif pengurus DPD II partai Golkar serta masukan dari kader partai dan masyarakat sebagai konsekwensi dari partai sebagai pendidikan politik. Sedangkan yang dimaksud dalam proses itu sendiri adalah pembahasan strategi serta situasi partai. Pembahasan yang dilakukan oleh pengurus DPD II itu harus memperjuangkan input yang mencerminkan aspirasi kader partai dan masyarakat. Pelaksanaan strategi

pengurus DPD II partai Golkar dapat dilihat dari pertemuan-pertemuan yang diadakan bersama seluruh kader partai dibawahnya dan masyarakat. Adapun output yang dihasilkan adalah kemenangan partai Golkar dalam pemilu 2004, dan meraih 20 kursi dari 10 kursi yang dihasilkan dalam pemilu 1999.

Dari pembacaan situasi yang dirangkum dalam tabel diatas terlihat partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman sangat jeli melihat peluang maupun tantangan dalam menghadapi pemilu 2004 dengan keyakinan para kader dalam memegang teguh organisasi. Dari program pokok yang dijadikan strategi kampenye telah tersedia sejak musyawarah daerah tingkat II. Hanya saja partai Golkar menjalankan strategi kampanye dilaksanakan saat-saat pemilu 2004. Sehingga masyarakat tidak terdidik secara politis karena yang dilakukan partai Golkar hanya dalam pemobilisiran massa dan hanya suara yang ingin dicapainya secara maksimal.

Sedangkan keterlibatan tokoh masyarakat diluar kader partai hanya menjadi ikon politik sesaat walaupun masyarakat Indramayu adalah masyarakat pragmatis tetapi seharusnya partai Golkar lebih berani membuka diri untuk kader yang lahir dari tengah mayarakat dan menjadi organisatoris partai. Kemudian lahirnya partai baru yang dijadikan permasalah adalah sangat naif dalam era demokrasi justru dengan munculnya partai baru Golkar harus lebih berani melahirkan ide serta gagasan yang lebih maju dan diintreprestasikan oleh calon anggota

legislatif jadi tidak retorika politik belaka. Melainkan pelaksanaan yang berani dan bertanggung jawab.

Berikut keterangan jumlah keseluruhan perolehan partai Golkar dalam pemilu legislatif.

Tabel 3.2
Jumlah Perolehan Suara Pemilu Legislatif
Dalam Pemilu 2004

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	Prosentase
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenis	2.440	0,27 %
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	1.773	0,19 %
3.	Partai Bulan Bintang	22.717	2,47 %
4.	Partai Merdeka	6.183	0,67 %
5.	Partai Persatuan Pembangunan	30.983	3,37 %
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	6.318	0,69 %
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	616	0,07 %
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	4.074	0,44 %
9.	Partai Demokrat	18.548	2,02 %
10.	Partai Persatuan Kesatuan Indonesia	12.040	1,31 %
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	1.918	0,21 %
12.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah	7.861	0,86 %
13.	Partai Amanah Nasional	20.618	2,24
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	19.525	2,12 %
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	127.176	13,83 %
16.	Partai Keadilan	24.716	2,69 %

	Sejahtera		
17.	Partai Bintang Reformasi	14.268	1,56 %
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	197.664	21,50 %
19.	Partai Damai Sejahtera	2.844	0,31 %
20.	Partai Golongan Karya	373.582	40,64 %
21.	Partai Patriot Pancasila	9.913	1,08 %
22.	Partai Serikat Indonesia	5.480	0,60 %
23.	Partai Persatuan Daerah	1.877	0,20 %
24.	Partai Pelopor	6.172	0,67 %
JUMLAH SUARA		919.306	-

Sumber : KPUD Indramayu

2. Kriteria Calon Anggota Legislatif

Calon anggota legislatif adalah hal yang terpenting guna melakukan pemobilisiran massa untuk memilih partai. Dengan pemilu yang menggunakan sistem baru maka pemilihan calon anggota legislatif harus yang benar-benar tanggu. Disamping kenal daerahnya juga memenuhi syarat yang sudah disepakatinya baik secara internal partai atau yang berhubungan dengan AD/ART partai. Adapun syarat-syarat yang ada dalam menentukan calon anggota legislatif adalah prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT). Prestasi sendiri meliputi[57] :

1. Lima tahun berada dalam jajaran partai Golkar
2. Konsisten pada partai
3. Terdidik

[57] AD/ART Partai Golkar Pasal 5

Sedangkan dedikasi meliputi :

1. Pengabdian
2. Pengorbanan
3. Konsepsional

Sedangkan loyalitas meliputi[58] :

1. Sering mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan partai
2. Patuh dan taat pada peraturan partai
3. Proaktif

Sedangkan tidak tercela meliputi :

1. Sebagai kader yang agamais
2. Tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan asusila
3. Patuh terhadap norma-norma masyarakat dan agama

Dengan adanya syarat administrasi partai juga melihat kualifikasi UU tentang pencalonan anggota legislatif. Karena dengan tolak ukur demikian maka kader yang dijadikan calon anggota legislatif bisa diterima oleh masyarakat. Dengan demikian untuk ketentuan syarat-syarat calon anggota legislatif berdasarkan keputusa UU pemilu Nomor 12/2003 adalah sebagai berikut :

a. Warganegara Republik Indonesia, berumur 21 tahun atau lebih.
b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu taat dalam menjalankan agamanya.
c. Berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[58] Ibid

d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.

e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.

f. Setia kepada UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

g. Bukan bekas organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam G 30 S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

j. Sehat jasmanai dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten.

k. Terdaftar sebagai pemilih.

l. Terdaftar sebagai anggota partai politik.

Dari sejumlah persyaratan dan ketentuan UU yang berlaku DPD II partai Golkar hanya menginstruksikan kepada jajaran dibawahnya agar mematuhi ketentuan tersebut. Karena penjaringan calon anggota legislatif dilakukan lewat konvensi yang dilakukan dengan

melibatkan pengurus Kecamatan sampai dengan pengurus Desa/Kelurahan didaerah pemilihannya. Dari 54 nama calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai Golkar dibagi menjadi 6 daerah pemilihan yang berdasarkan surat ederan KPU pusat nomor 652 tahun 2003. Mengenai ketentuan daerah pemilihan, dan jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat Kabupaten Indramayu. Berikut penetapan daerah pemilihan, berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah kursi anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten Indramayu.

Tabel 3.3
Penetapan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Propinsi Jawa-Barat Kabupaten Indramayu

No.	Daerah Pemilihan	Penduduk	Jumlah Kursi
	DP Indramayu 1 Meliputi Kecamatan :		
1.	Indramayu	108.091	
2.	Sindang	60.328	
3.	Cantigi	22.849	
4.	Arahan	35.145	8
5.	Lohbener	52.122	
6.	Balongan	23.146	
	DP Indramayu 2 Meliputi Kecamatan :		
1.	Karangampel	104.927	
2.	Jatinyuat	82.768	7
3.	Krangkeng	64.384	
	DP Indramayu 3 Meliputi Kecamatan :		
1.	Sliyeg	67.573	
2.	Jatibarang	69.319	
3.	Widasari	53.485	9
4.	Kertasemaya	88.861	
5.	Bangodua	59.632	
	DP Indramayu 4 Meliputi Kecamatan :		
1.	Losarang	54.533	
2.	Lelea	46.852	5
3.	Cikedung	89.232	

	DP Indramayu 5 Meliputi Kecamatan :		
1.	Kadanghaur	83.530	
2.	Bongas	44.397	
3.	Gabuswetan	53.930	7
4.	Kroya	59.844	
	DP Indramayu 6 Meliputi Kecamatan :		
1.	Sukra	92.304	
2.	Anjatan	85.821	9
3.	Haurgelis	151.771	
	Jumlah	1.654.844	45

Sumber : KPUD Indramayu

Sedangkan untuk 54 nama yang telah dicalonkan berdasarkan pada daerah pemilihannya masing-masing yang telah dilakukan melalui mekanisme konvensi yang secara otonom dilakukan oleh pengurus kecamatan dan pengurus desa. Dari persayaratan administrasi yang telah terpenuhi baik dari undang-undang pemilihan umum sampai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai Golkar.

Adapun nama-nama yang terpilih dalam pencalonan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Indramayu dalam pemilihan umum 2004. adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Nama-nama Calon Anggota Legislatif Partai Golkar
Kabupaten Indramayu Serta Daerah Pemilihan Dalam Pemilu 2004

No.	Nama Calon	Daerah Pemilihan
1.	Hj.Cholida Dwiyatiningrum	Indramayu 1
2.	Mahpudin, SH	
3.	H.Sugianto Ruslan, SE	
4.	Taufik Hidayat	
5.	H.Munadi Abdul Ghani, SE	
6.	Hatta	
7.	Kuryanto Setia, SE	
8.	Dadang Hermawan	
9.	Amanah, SH	
10.	Hj.Ayi Awaningsih Suryaman	
1.	Hj.Sophanah	Indramayu 2
2.	Drs.Abdul Rozaq	
3.	Badruddin	
4.	Hj.Nani Ratnaningsih	
5.	Eni Sukaeni	
6.	Drs.H.Saimin Murkana, MM	
7.	H.Warka'I Sujud	
8.	M.Warpan Jaya Lelana, SH	
1.	Ruyanto	Indramayu 3
2.	Warmin Permana	
3.	Hais Lasimpala	
4.	Ahmad Nasiruzzaman	
5.	Masduki Nawawi	
6.	Mulyanto, BA	
7.	Ir.Sucipto	
8.	Abdulloh	
9.	Susendi Restu	
10.	Sonhadji Chariri	
11.	Sukarsih Suin Alias UU	
1.	H.Uryanto Hadi, SH, SE	Indramayu 4
2.	H.Urip	
3.	Casmita Hadi	
4.	Hj.Emi Jumiarsih, SE	
5.	Muhadi Suryana	
6.	H.Tambak Arifin	
1.	Drs.Soekarno E, MM	Indramayu 5
2.	H.M.Hasyim Junaedi, S,ag	
3.	Ipik Fikriyah	
4.	H.Darwa Saputra	
5.	Jeni Eryudin, SE	
6.	Dedi Setiawan Sastradinata	
7.	Supratiningsih	

8.	H.Rawita	
1.	Abdul Rahman	Indramayu 6
2.	Komarudin	
3.	Atoilah Dalil	
4.	Aminah, S,ag	
5.	H.Sofwan Hidayat	
6.	Drs. Khairudin, MM	
7.	Darja	
8.	Rengsih, Amd	
9.	Jubaedah	
10.	Hery Kuswandi	
11.	Wasnata	

Sumber : KPUD Indramayu

Sedangkan untuk penetapan serta ketentuan nomor urut caleg berdasarkan kriteria pencalonan legislatif yang terkait apa yang disebut PDLT artinya pengabdian, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (amoral) ini bisa diartikan dengan waktu minimal dalam jajaran pengurus adalah lima tahun tidak pernah terputus, serta ditentukan dengan kepemilikan sertifikat pelatihan kader yang diadakan di Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Daerah Tingkat I, serta Dewan Pengurus Daerah Tingkat II. Dengan kepemilikan sertifikat minimal 2 buah dan selanjutnya dengan sertifikat-sertifikat kegiatan lainnya. Untuk penentuan tidak tercela adalah tidak dalam masa penahanan pihak berwajib, atau tidak dicabut haknya dalam pencalonan juga dikenal didaerah pemilihannya serta tidak pernah melanggar norma serta etika ditengah masyarakat seperti mabuk-mabukan, dan poligami, walau poligami disini masih pro dan kontra partai Golkar mengambil kebijakan itu adalah cara aman untuk menghargai perempuan. Sedangkan untuk administrasi internal partai yang telah menjadi keputusan

pengurus daerah meliputi dana minimal keuangan untuk pengembangan organisasi serta kebutuhan lainnya dalam masa kampanye.

Untuk keikutsertaan para calon anggota legislalatif diluar kader partai Golkar adalah berdasarkan AD/ART tentang sifat dan fungsi. Karena partai Golkar dan berorientasi karya serta kekaryaan karya dan kekaryaan disini dilihat sebagai manifestasi seorang tokoh kepada masyarakat serta partai untuk saling mendukung dan memiliki sikap persamaan politik. Sikap persamaan politik dimaksudkan satu pandangan dan cita-cita politik.

Ketentuan keterlibatan tokoh masyarakat diataur dalam mekanisme partai seperti menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam bermasyarakat. Tahapan itu sebelumnya dilihat mental ideologi, prestasi, dedikasi, disiplin, serta tidak tercela. Walau ini sama dengan kewajiban kader partai Golkar dalam pencalonan anggota legislatif tetapi untuk tokoh masyarakat tidak perlu dengan hitungan aktif dipartai selama lima tahun. Tetapi cukup dengan penyaringan mental ideologi, prestasi, dedikasi, disiplin loyalitas dan tidak tercela. Yang ini dilihat dari hubungan partai dengan organisasi kemasyarakatan yang terjalin selama ini.[59]

[59] Wawancara dengan wakil ketua DPD II partai Golkar Kabupaten. Indramayu dikantor DPD II partai Golkar antara pukul 09.00 – 11.30

Mental idiologi disini adalah ketidakterlibatannya pada organisasi-organisasi terlarang sedangkan untuk prestasi pernah memegang suatu organisasi kemasyarakatan. Sedangkan dedikasi adalah kemauan untuk dicalonkan serta ada kontrak yang ditandai oleh kesepakatan-kesepakatan antara DPD II partai Golkar yang disaksikan oleh pengurus kecamatan hingga pengurus desa.[60]

Untuk masyarakat yang dilibatkan hanya memenuhi persyaratan administrasi seperti peraturan-peraturan dalam undang-undang pemilu serta peraturan yang telah digariskan oleh DPD II partai Golkar. Serta pembiayaan sendiri guna memenuhi pembiayaan selama kampanye. Sedangkan ketentuan minimal dalam pengembangan organisasi.[61]

Sedangkan untuk otoritas dalam menentukan nomor urut calon anggota legislatif adalah tim penjaringan yang menjadi hak proregatif DPD II partai Golkar yang langsung diketuai oleh ketua umum partai. Adapun nama-nama tim penjaringan terlihat dalam tabel berikut :

---

[60] Ibid

[61] Wawancara dengan tokoh masyarakat dirumah pribadi pada tanggal.10 Februari 2005 antara pukul 19.00 – 21.30 untuk jumlah minimal tidak disebutkan dalam angka.

Tabel 3.5
Susunan Tim Penjaringan
Partai Golkar dalam Pemilu 2004

No	Nama	Jabatan
1.	H. Irianto MS. Syaifudin	Ketua Umum
2.	H.Sudjaya	Wakil Ketua
3.	Bagus Pradesta SH	Ketua Pengarah
4.	H. Taryono Tarma M,si	Ketua Pengarah
5.	Hj. Sumihayati Wahidah S,ag	Sekretaris
6.	Ibnu Khairudin	Sekretaris
7.	Mohamad Nasir SE	Pengarah Materi
8.	Drs. Hary Krismanto	Pengarah Materi
9	Drs. Idham Rosidin	Pengarah Materi
10.	Waryanto S,ip	Informasi dan Data
11.	H. Khomarudin Umar	Informasi dan Data
		Informasi dan Data

Sumber Litbang DPD II Partai Golkar

Sedangkan untuk ketentuan nomor caleg dari luar kader partai (tokoh masyarakat) sebelumnya dibicarakan antara pengurus kecamatan serta desa untuk daerah pemilihannya dengan pertimbangan bahwa keikutsertaan mereka adalah untuk mendongkrak suara partai Golkar dalam daerah pemilihan yang dirasa masih kurang. Walau dengan konsekwensi ditempatkan pada nomor urut sepatu. Walau demikian tokoh masyarakat menerima karena meyakini konsituent (simpatisan) partai Golkar di Indramayu akan memilih dirinya karena ketokohannya yang popular dan bisa menembus angka BPP.

Walau keterlibatan tokoh masyarakat tidak dilarang dalam ketentuan undang-undang pemilu No.12/2003. Tetapi keterlibatan mereka menandakan lemahnya hubungan partai Golkar secara ideologis dengan

masyarakat karena bergabungnya tokoh masyarakat berarti partai Golkar menafikan sistem perkaderan yang telah ada selama ini. Sebab mereka hanya akan dijadikan *"Show Politic"* bukan murni karena penyaringan partai. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat yang telah terbuka diri secara politik ketika mulai lepas dari kurungan selama 32 tahun.

Sedangkan semangat dari undang-undang pemilihan umum No.12/2003 pasal 65 ayat 1 terlihat dari ketentuan pencalonan anggota legislatif perempuan yang mengharuskan partai politik untuk mengajukan 30 %. Tetapi dari nama-nama calon anggota legislatif perempuan hanya 24 % dari 13 nama yang dicalonkan. Ini menandakan bahwa perempuan masih dibawah kaum pria *(patriarki)*. Seharusnya partai Golkar menyiapkan perempuan sebagai bagian dari dinamika partai.

Dalam rumusan pasal 65 tersebut merupakan komitmen penting dari negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dilembaga legislatif. Sedangkan keterwakilan perempuan dari jumlah 53 caleg perempuan hanya 24 % sedangkan untuk kaum pria 76 % Adapun nama-nama calon anggota legislatif perempuan.

Tabel 3.6
Nama Calon Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kabupaten Indramayu Berdasarkan Daerah Pemilihan

No	Nama Calon Anggota Legislatif Perempuan	Daerah Pemilihan
1. 2. 3.	Hj.Cholida Dwiyatiningrum Amanah, SH Hj.Ayi Awaningsih Suryaman	Indramayu 1
1. 2. 3.	Hj.Sophanah Hj.Nani Ratnaningsih Eni Sukaeni	Indramayu 2
1.	Sukarsih Suin Alias UU	Indramayu 3

1.	Hj.Emi Jumiarsih, SE	Indramayu 4
1. 2.	Ipik Fikriyah Supratiningsih	Indramayu 5
1. 2.	Aminah, S,ag Rengsih, Amd Jubaedah	Indramayu 6

Sumber : KPUD Indramayu

Untuk pemilihan umum yang akan datang tentunya partai Golkar harus lebih memperhatikan perempuan tentunya harus diikuti dengan pemberdayaan serta memberikan kesempatan yang setara dengan kaum pria.

Kesungguhan partai juga dilihat dari pencalonan anggota legislatif dari sisi pendidikan. Karena persoalan calon anggota legislatif dilihat dari kapasitas intelektualitasannya. Tentunya dengan disiplin ilmu yang memadai guna menjawab permasalahan dalam negeri yang sangat kompleks. Mulai dari krisis ekonomi, lalu dilanjutkan dengan politik, serta penggeseran nilai-nilai budaya serta sosial masyarakat. Dari persoalan itu tentunya butuh penganalisisan yang lebih tajam. Maka secara logika pendidikan formal yang menjawab itu hanya ada pada perguruan tinggi. Artinya pengalaman pendidikan yang seharusnya diutamakan oleh partai politik guna mengajukan calon anggota legislatif.

Pengajuan calon anggota legislatif yang dilakukan partai Golkar secara keseluruhan adalah SMA. Walau ini telah sesuai dengan undang-undang pemilihan umum. Tetapi masyarakat yang sekarang lebih terbuka tentunya akan menjawab lain. Dari 54 nama calon anggota legislatif yang diajukan partai Golkar untuk tingkat pendidikan SMA mencapai 54,72 %

dari 29 nama, sedangkan untuk Diploma tiga 9,43 % 5 nama sedangkan Strata satu 28,30 % dari 15 nama, dan untuk strata dua hanya 28,30 % dari 4 nama. Berikut beberapa nama calon anggota legislatif berdasarkan pendidikan.

Tabel 3.7

Jumlah Calon Anggota Legislatif Partai Golkar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Daerah Pemilihan						Jumlah	Prosentase
		1	2	3	4	5	6		
1.	SMA/SEDERAJAT	1. Hj.cholida Dwiyatiningrum 2. Taufik Hidayat 3. Hatta 4. Hj.Ayi Awaningsih Suryaman	1. Hj. Shopanah 2. Badruddin (jhon) 2. Warkai	1. Ruyanto 2. warmin Permana 3. Hais Lasimpala 4. Ahmad Nasiruzzaman 5. Abdulloh 6. Sondhaji Chariri	1. H. Urip 2. Casmita Hadi 3. Muhadi Suryana	1. Ipik Fikriyah 2. Dedi Setiawana Sastradinata 3. Supratingsih 4. Rawita	1. Abul Rahman 2. Komarudin 3. Atoillah Dalil 4. H. Sofwan Hidayat 5. Darja 6. Jubaedah 7. Wasnata	29	54,72 %
2.	D3	-	1Hj. Nani Ratnaningsih 2.Eni Sukaeni	1. Mulyanto BA	1. H. Tambak Arifin	-	1. Rengsih A,md	5	9,43 %
3.	S1	1. Mahpudin SH 2.H.Sugianto BBA, SE	1. Drs. Abdul Rozaq Muslim 2. Mohamad Warpan Jayalelana	1. Ir. Sucipto 2. Sukarsih Suin Alias UU	1. H. Uryanti Hadi, SH SE 2. Hj. Emi Jumiarsih,	1. H. Darwa Saputra, SH 2. Drs. Jeni Eryudin	1. Aminah S,ag 2. Heri Kuswandi,	15	28,30 %

Dari nama-nama calon anggota legislatif yang telah didaftarkan kepada KPUD Indramayu tersebut hampir sebagian berwiraswasta, pegawai swasta, guru, pensiunan PNS, serta sebagian kecil purnawirawan, dan pengacara. Sedangkan untuk perempuan hampir rata-rata sebagian ibu rumah tangga. Walau sebelumnya dari keseluruhan jumlah calon anggota legislatif ada yang pernah menduduki legislatif pada priode terdahulu.

Dari latarbelakang pekerjaan secara keseluruhan belum bisa diyakini kalau calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai Golkar mampu mengemban tugas serta tanggung jawab kepada masyarakat. Ini diukur dari jenis pekerjaan secara professional ; karena menyangkut kredibilitas seorang calon anggota legislatif.

Berikut keterangan jumlah calon anggota legislatif berdasarkan jenis pekerjaan.

Tabel 3.8

Jumlah Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Daerah Pemilihan						Jumlah	Prosentase
		1	2	3	4	5	6		
1.	Mantan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu	Hj.Cholida Dwiyatiningrum	Drs.Abdul Rozaq Muslim	Ruyanto	H. Tambak Arifin	H. M. Hasyim J., S.Ag., MBA	Abdul Rahman	6	11,32 %
2.	Wiraswasta	1.H.Sugianto BBA, SE 2.H.Mun adi Abdul.G. BBA, SE 3.Dadang Hermawan	1.Badruddin (jhon) 2.Mohamad Warpan	1.Hais Lasimpala 2.Ahmad Nasiruzzama 3.Mulyanto BA 4.Ir.Sucipto	1. H. Uryanto Hadi, SH, SE 2. H. Urip 3.Casmita Hadi 4.Hj. Emi Jumiarsih, SE	1 Drs.Jenieryudin 2. Dedi Setiawan. 3. Rawita	1. Atoillah Dalil 2. H. Sofwan Hidayat 3.Drs.H.Khairudin MM 4.Darja 5.Rengsih, Amd 6.Jubaedah 7.Heri Kuswadi, BBA	23	43,40 %
3.	Pengacara	Mahpudin SH	-	-	-	-	-	1	1,89 %
4.	Pegawai Swasta	1. Taufik Hidayat 2. Hatta 3. Kuryanto Setia R, SE	-	Ruyanto	-	-	-	4	7,55 %

5.	Ibu Rumah Tangga	1. Amanah SH 2. Hj. Ayi Awanigsih Suryaman	1.Hj.Sopiah 2.Hj.Nani Ratnaningsih, BA 3.Eni Sukaeni	Sukarsih Suin Alias UU	-	1. Ipik Fikriyah 2.Supratiningsih	-	8	15,09 %
6.	Pensiunan PNS	-	1.Drs.Saimin Murkana, MM 2.Warkai	1.Masduki Nawawi 2.Sonhadji Hariri	Muhadi Suryana	H. Darwa Saputra, SH.	1.Komarudin 2.Wasnata	8	15,09 %
7.	Guru	-	-	Warmin Permana	-	-	Aminah, S,Ag	2	3,77 %
8.	Purnawira wan	-	-	-	-	Drs. Soekarno Ermawan, MM, MBA	-	1	1,88 %

Sumber : KPUD Indramayu Tentang Biodata Caleg

Dengan rata-rata sebagai wiraswasta para calon anggota legislatif ini belum memiliki pengalaman karena dari keterangan biodata sebagian hanya punya pengalaman dalam pemerintahan desa (lihat keterangan biodata dalam lampiran). Disamping aktif dalam organisasi baik dalam partai sendiri atau organisasi masyarakat. Dengan demikian barangkali sangat pesimistis kalau anggota dewan dari partai Golkar dengan latar belakang pekerjaan seperti itu.

Dalam pelaksanaan kriteria calon anggota legislatif partai Golkar telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang sesuai dengan menyerahkan kepada pengurus bawahnya di Kecamatan hingga pengurus yang di Desa untuk melakukan konvensi. Hanya permasalahannya untuk penentuan nomor caleg diserahkan kepada tim penjaringan yang diketuai oleh ketua umum DPD II partai Golkar yang secara notabene adalah kepala pemerintahan (bupati). Dengan hal ini tentunya keinginan bupati dalam mencari dukungan diparlement juga sangat mempengaruhi kerja-kerja calon anggota legislatif ketika sudah terpilih menjadi anggota dewan.

3. Mekanisme dan Rekrutmen Calon Anggota Legislatif

Rekrutmen apa yang telah disinggung di Bab I adalah penyeleksian individu yang berbakat untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Dengan demikian rekrutmen politik berhubungan dengan karier seseorang. Adapun cara yang ditempuh dalam melaksanakan rekrutmen politik ini anatara lain melalui kontak pribadi, persuasi dan juga dapat diusahakan dengan cara menarik golongan muda untuk menjadi kader yang dimasa mendatang diharapkan dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan menggantikan pejabat-pejabat lama.

Begitu juga mekanisme rekrutmen yang diadakan DPD II partai Golkar Kabupaten Indramayu sesuai AD/ART partai Golkar bahwa rekrutmen terhadadap individu berdasarkan :[62]

a. Kader partai yang telah terbukti mempunyai kepribadian yang baik, prestasi, dedikasi, disiplin dan tidak tercela, serta loyalitas yang tinggi terhadap partai.
b. Memiliki kapasitas, kapabilitas dak akseptabilitas
c. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.
d. Mampu bekerja sama secara kolektif.
e. Dapat meluangkan waktu dan dapat bekerja aktif dalam partai.

[62] *Ad/Art Partai Golkar* Pasal 6

f. Aktif berjuang dijajaran Golkar sekurang-kurangnya lima tahun secara terus-menerus untuk menjadi tingkat kelurahan/desa, pimpinan tingkat Kecamatan, daerah pimpinan tingkat II serta dewan pimpinan pusat.

Dalam ketentuan mekanisme rekrutmen tentunya DPD II partai Golkar melihat AD/ART ini menjadi tolak ukur. Hanya saja tidak dijelaskan dalam sub-point yang tentunya agar bisa dicerna oleh para kader. Seperti yang terlihat dalam point d, dalam halnya fenomena anggota dewan di Indonesia lebih patuh kepada garis partai dengan pertimbangan kepentingan politik Oleh karenanya calon anggota legislatif sering kali terstruktur oleh eksekutif bahkan bisa dikatakan manut terhadap hak-haknya ketika menjadi anggota dewan. Dan lebih mementingkan idealitas partainya tetapi tidak mampu menerjemahkan kepentingan masyarakat yang lebih banyak.

Sedangkan untuk pembatasan tentang rekrutmen pada pembahasan ini hanya mengenai ketentuan DPD II partai Golkar dalam rekrutmen calon anggota legislatif dalam pemilu 2004 di Indramayu.

Berdasarkan UU pemilu tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kota/Kabupaten bahwa :

1. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kota/Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan yang memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 %.

2. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120 % jumlah kursi yang ditetapkan pada daerah pemilihan.

Sedangkan untuk mekanisme pencalonannya :

1. Calon anggota DPR disampaikan KPU Pusat.
2. Calon anggota DPRD Propinsi disampaikan KPU Propinsi.
3. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini keputusan yang diambil DPD II partai Golkar dalam mekanisme dan rekrutmen berdasarkan kepada syarat pencalonan anggota legislatif yang telah diatur dalam ketentuan partai serta undang-undang. Sedangkan untuk mekanisme pemilihannya DPD II partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus Kecamatan dan Desa dalam penjaringan calon anggota legislatif untuk daerah pemilihannya. Hasil dari nama-nama calon anggota legislatif adalah penyaringan dari mental ideologi, prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela, kemampuan berdiri sendiri, serta telah melalui pendidikan latihan kader. Dari pertimbangan itu seorang kader partai Golkar berhak maju untuk menjadi calon anggota legislatif. Walaupun dalam perjalanannya diuji dengan kepemilikan sertifikat kader serta mampu membiayai organisasi secara minimal, dan kemampuan materi sendiri guna pembiayaan selama masa kampanye.

Sedangkan untuk keterlibatan tokoh masyarakat diluar kader partai sebelumnya telah ada perbincangan pada rapat bulanan setelah musyawarah daerah dan dilakukan sebelum pemilu berlangsung yang dilakukan dengan pengurus kecamatan serta desa. Sedangkan ketentuan nomor urut bagi kader partai Golkar dilihat dari prestasi yang dimiliki artinya selama dipartai sudah berapakali jabatan yang diembannya, sedangkan loyalitas adalah dengan lima tahun berturut-turut pada partai Golkar. Kemudian tidak tercela adalah dengan dikenalnya seorang calon anggota legislatif didaerah pemilihannya serta tidak punya catatan buruk artinya selama calon tidak pernah bertentangan dengan norma masyarakat (etika) dan agama. Sedangkan pelatihan yang dilakukan baik oleh DPP, DPD tingkat I, serta DPD tingkat II dan seorang calon wajib memiliki sertifikat pelatihan kader minimal 2.

Sedangkan untuk penentuan nomor urut bagi tokoh masyarakat adalah hak proregatif ketua umum yang sebelumnya dibicarakan oleh pengurus kecamatan didaerah pemilihan yang dirasa jauh dari konstituen partai Golkar. Penentuan nomor urut dilakukan oleh senior partai Golkar yang diketuai oleh ketua partai Golkar. tim penjaringan hanya menentukan nomor caleg berdasarkan ketentuan (peraturan) yang telah disepakati. Tim penjaringan sendiri diketuai oleh ketua umum partai Golkar yang juga sebagai Bupati. Mekanisme yang diambil dalam penentuan nomor caleg adalah dengan mengadakan lobi-lobi politik.

Pemberlakuan waktu dalam konvensi hingga ditentukan nomor urut adalah selama satu tahun. Selama satu tahun tim penjaringan terus memantau perkembangan sampai dengan pelaksanaan pemilu 2004 berlangsung. Selain menggunakan mekanisme dan prosedur konvensi partai juga mengadakan acara temu kader serta masyarakat seperti pelantikan pengurus baru ditingkat desa-desa, dengan mensosialisasikan calon anggota legislatif juga memaparkan visi dan misinya didaerah pemilihannya masing-masing. Dengan alasan terpilihnya menjadi calon anggota legislatif bukan dengan tangan hampa melainkan sudah mempunyai konsep kalau sampai terpilih.

Sehingga harapan para kader yang terpilih bisa sesuai dengan keinginan partai Golkar. Dengan telah berjalannya pemerintahan dilegislatif hingga sekarang kader Golkar akhirnya mampu menjadi ketua dewan. Dan ini merupakan prestasi tersendiri. Walaupun demikian pengurus DPD II partai Golkar tetap mengontrol para kadernya dilembaga legislatif. Jika dalam perjalanannya ada anggota legislatif yang tidak mengindahkan garis partai maka DPD II akan menggunakan hak proregatifnya yaitu ditegur atau direcall dari kursi dewan.

Sedangkan rekrutmen adalah hal yang terpenting dalam sebuah partai politik karena ini menyangkut kesinambungan partai dan regenerasi partai pada perjalanannya nanti. Terjadinya rekrutmen politik DPD II partai Golkar, melihatnya lebih kedepan agar ada penyegaran partai. Maka kebijakan yang diampil dalam rekrutmen politik adalah meliputi berbagai

segment baik kader muda atau kader yang telah makan asam garam (pengalaman). Maka yang diambil adalah dari berbagai golongan seperti pemuda, wanita, ulama, dan pengusaha. Juga melibatkan berbagai organ sayap partai Golkar yang dimilikinya seperti AMPI, AMPG, dan Perhimpunan Perempuan partai Golkar. Dengan menggunakan mekanisme organisasi seperti melibatkan pengurus yang ada didalamnya.

Walaupun demikian partai menggunakan prioritas seperti implementasi dan proaktif kader dalam mengembangkan karier politiknya lewat jalan rekomendasi dari Kecamatan dan Desa/kelurahan yang akan diproyeksikannya.

Mengenai ketentuan 30 % bagi kader perempuan, Golkar dalam melakukan rekrutmenya memberi kesempatan. Hingga sekarang anggota legislatif yang berasal dari perempuan berjumlah 4 orang walaupun masih jauh dari jumlah ketetapan, partai Golkar Kabupaten Indramayu melihat perempuan mempunyai keterbatasan. Sehingga mobilitas dan kemampuannya untuk sekarang masih jauh dari harapan.

Dari data dan kajian dilapangan kemenangan partai Golkar khususnya di Kabupaten Indramayu, apa yang diungkapkan saat ditemui penulis tak lepas dari konsistenya partai untuk menjalankan program-program disamping garis ideologis yang menjadi pijakan penting tentang Golkar baru. Program yang direalisasikan adalah penggalangan yang bertumpu pada territorial desa yang membentuk kelompok kader desa yang didukung dengan penggalangan umum. Penyiapan pelaksanaan

kampanye dengan kegiatan penyusunan tema dan sub tema kampanye seperti penciptaan opini, counter issu-issu akual dan penataran jurkam serta penyusunan manajemen kampanye. Sedangkan ditingkatan masyarakat melaksanaan pembinaan kesejahteraan serta bantuan sosial dalam membantu kerisis pangan masyarakat. Serta melaksanakan kegiatan bantuan kesehatan.

Sedangkan ideologis yang dipakai adalah mempertegas untuk menyerap, memadukan dan memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik. Melakukan rekrutmen kader yang berkualitas serta mendapat dukungan masyarakat untuk duduk dalam jabatan-jabatan politik dilembaga perwakilan dan pemerintahan. Sehingga seluruh jajaran berkeyakinan Golkar akan bisa memenangkan pemilu Tahun 2004. Dengan berbagai tuduhan justru menjadi hikmah bagi seluruh jajaran pengurus untuk bersatu.

Kemenangan partai Golkar memang tak semuanya berjalan mulus karena adanya juga persoalan-persolan. Seperti masalah keuangan partai karena dengan mensosialisasikan program-program ditengah masyarakat terutama dimasyarakat pedesaan yang memakan waktu dan materi lebih banyak. Juga munculnya partai-partai baru dan beberapa basis Golkar yang ada didaerah pelosok banyak yang mengikuti partai baru, tetapi ini tidak sesuatu yang berpengaruh tetapi akan menjadi kajian yang perlu diperhatikan.

Dari kemenangan itu adalah faktor terpenting adalah solidnya jajaran pengurus partai yang mampu mengakomodasikan beberapa kepentingan dan faktor ketua umum yang juga salah satu kader nomor satu (bupati) di kabupaten Indramayu. Apalagi peran ketua umum selaku Bupati mampu mengangkat daerah ini yang sebelumya tak punya prestasi didaerah Jawa-Barat, dari berbagai kebijakannya seperti adanya pekan olah raga daerah (porda) yang memacu kondisi perekonomian masyarakat, pemecatan terhadap camat dengan adanya tawuran, dan wajib bagi siswa yang melanjutkan ke SMP harus memiliki ijajah ibtidaiyah. Dengan program demikian Indramayu yang selalu dilanda tawuran bisa diminimalisir.

Dengan demikian peran sentral dan figur Bupati yang juga selaku ketua umum partai menjadi panutan. Sehingga target partai Golkar dalam pemilu 2004 sesuai dengan harapan. Walau demikian partai Golkar tetap akan mempertahankan sebagai mayoritas tunggal di DPRD. Dan bisa mempengaruhi berbagai kebijakan atau proses politik yang berlangsung.

Walaupun telah sesuai target tetapi masih dirasa kurang optimal dalam menjalankan kebijakan partai terutama untuk koordinasi dan konsolidasi diantaranya adalah dana. Dan untuk pemilu yang akan datang Golkar tetap akan mensolidkan barisan dan bisa mencapai dari yang sekarang.

4. Sistem Perkaderan

Perkaderan adalah hal yang mutlak dilakukan, oleh karenanya kader yang dipilih harus sesuai ketentuan organisasi (AD/ART). Oleh karenanya Golkar mencari bibit unggul yang mampu bisa berbicara untuk kepentingan partai Golkar serta masyarakat. Sistem perkaderan dilakukan dengan pertemuan yang wajib diikuti oleh para kader. Dan ini modal terpenting agar kemauan dan kemampuannya bisa terlihat. Hingga sekarang kader Golkar yang tercatat dalam data sekitar 3.000 an. Dan tidak ada biaya administrasi hanya cukup dengan fhoto yang dipasang dibuku data. Kesempatan kader tentunya akan terbuka Ketentuan partai Golkar dengan pergantian antar waktu (mundur diri), pergantian berjenjang (Musda, Muscab, Musdes) selama 5 Tahun sekali.

Permasalahan yang dihadapi partai Golkar sekarang ini adalah kurangnya kader yang berkualitas dan masih banyak kekurangan misalnya sering tidak pernahnya kader mengikuti beberapa pertemuan maka kita sulit untuk menditeksinya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan DPD II Partai Golkar

1. Faktor Pendukung

Guna menunjang keputusan partai agar sesuai yang diharapkan maka hal yang terpenting adalah melibatkan jajaran pengurus yang ada. Tidak hanya pengurus daerah, tetapi Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Dalam mengambil keputusan partai Golkar dengan memusyawarahkan

karena dalam AD/ART partai Golkar pasal 16 bahwa DPD II bersifat kolektif guna memutuskan persoalan.

Dalam rekrutmen ini adalah DPD II menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus Kecamatan serta pengurus desa untuk menentukan calon anggota legslatif dalam daerah pemilihannya sehingga pengurus kecamatan serta pengurus desa mempunyai hak otonom. Dari pelaksanaan itu DPD II hanya menintruksikan ketentuan partai yang sesuai dengan UU pemilu serta AD/ART partai Golkar tentang persyaratan calon anggota legislatif.

Sedangkan unsur penunjang yang lainnya adalah peranan ketua umum partai yang juga sebagai bupati Indramayu. Tak hanya sebagai ketua partai tetapi sebagai sosok bupati yang menggambarkan tipe kepemimpinan yang populistik yang setiap saat turun langsung ditengah masyarakat. Serta kebijakan yang sangat berani dengan menansurasikan KTP yang baru pertama ada di Indonesia. Sehingga sosok bupati saat ini adalah sosok yang sangat popular ditengah masyarakatnya.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang menjadi kendala adalah masalah informasi serta komunikasi dan anggaran keuangan partai. Sebab partai Golkar sendiri tidak membebankan iuran itu kepada seluruh kader serta jarak geografis juga sulitnya tranportasi karena sebagian Desa-desa daerah Indramayu dilalui sungai dan sangat sulit dijangkau untuk pertemuan-pertemuan dilakukan kecuali hanya moment besar.

C. Pengembangan Basis Partai Golkar

Pengembangan basis partai adalah perlu guna memberikan penjelasan tentang partai Golkar sekarang. Maka sosialisasi perlu dilakukan secara kontinyu agar Golkar bisa diterima masyarakat. Dengan hal ini Golkar menggandeng berbagai organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, alim ulama, serta kelompok strategis masyarakat lainnya seperti pemuda, wanita, petani dan nelayan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Seperti kegiatan tentang sosialisasi pemilu, sunatan massal, dan pasar murah. Melayani dan membantu masyarakat dalam mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, serta masalah-masalah strategis kemasyarakatan lainnya.

D. Analisis Hasil Pemilu 2004

Dengan kemenangan partai Golkar tentunya hal yang sangat membanggakan, lebih-lebih pemilu 2004 berjalan aman dan damai. Partai Golkar melihatnya adanya kedewasaan berpikir masyarakat yang telah dewasa. Dan keterlibatan tokoh masyarakat, seniman, serta kaum intelektual (akademisi). Dengan demikian kegiatan yang dilakukan serta kerja keras jajaran kader, mampu mendongkarak suara dan menambah perbendaharaan kursi legislatif. Diatas rata-rata daerah pemilihan, Golkar memposisikan sebagai mayoritas tunggal yang dilihat dari jumlah caleg partai Golkar yang mampu mendominasi. Walaupun ada nama-nama caleg

yang meraih dengan jumlah suara sangat signifikan dan berada dibawah nomor urut. Karena yang bersangkutan adalah seniman dan tokoh masyarakat yang cukup dikenal didaerahnya. Sedangkan dari beberapa nama yang menempatkan nomor urut 1 tetapi perolehan suaranya jauh dari caleg yang bernomor urut sepatu. Dikarenakan nama yang tertera tidak dikenal dimasyarakat daerah pemilihannya. Karena hampir setiap daerah pemilihan diikutsertakan kalangan seniman lokal yang cukup populer.

Lebih-lebih masyrakat Indramayu adalah masyarakat pragmatis, artinya masyarakat masih melihat tokoh bukan program-program yang terkadang tidak realistis. Dengan kontek ini partai Golkar dan partai yang lain seharusnya mengembalikan posisinya sebagai partai yang memberikan pendidikan politik kepada rakyat.

E. Hasil Kegiatan dan Program Partai

Dari kegiatan dan program yang dijalankan ternyata membawa sesuatu yang positif. Perolehan suara dari daerah pemilihan yang tadinya tidak diperhitungkan ternyata membawa hasil yang tak terduga. Disamping adanya para tokoh masyarakat, ulama, yang mendaftar menjadi anggota partai.

Tidak hanya itu Golkar juga melihat dampak dari semakin mengertinya masyarakat tentang mekanisme pemilu dan membantu masyarakat yang tidak mampu. Juga mempengaruhi berbagai kebijakan eksekutif dari perolehan data yang ada dimasyarakat. Karena ini dukung oleh Bupati selaku ketua umum partai Golkar di Indramayu.

Sehingga hubungan Golkar dengan masyarakat bisa tersalurkan melalui mekanisme atau prosedur yang sesuai. Oleh hal itu setelah kemenangan Golkar banyak anggota masyarakat yang mendaftar. Golkar melihatnya adalah penyaluran wadah politik dengan ukuran bahwa agenda dan program yang dilaksanakan oleh pengurus partai Golkar telah berhasil.

Ini juga tak lepas dari organ sayap partai Golkar seperti AMPI, AMPG, dan ormas kewanitaannya. Yang selalu menawarkan program-programnya kepada pengurus Golkar. Walau dengan demikian Golkar masih melihat kekurangan diantaranya adalah tidak massifnya peranan kader ditengah masyarakat sehingga sering kali masyarakat menyalah artikan kegiatan dan program yang dilaksanakan.

F. Perolehan Suara Golkar Dalam Pemilu 2004

Tabel 3.9
Hasil Suara Partai Golkar, Jumlah Kursi Yang diPeroleh dan Calon Anggota legislatif

No.	Nama Calon	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara Sah Calon	Jumlah Suara Sah Partai Golkar	Jumlah Kursi Yang Diperoleh Partai Politik	Keterangan Jadi/Tidak Jadi
1.	Hj.Cholida Dwiyatiningrum	I	7.100	**70.031**	**4**	Jadi
2.	Mahpudin, SH		2.916			Jadi
3.	H.Sugianto Ruslan, BBA, SE		3.948			Jadi
4.	Taufik Hidayat		4.356			Jadi
5.	H.Munadi Abdulghani BBA, SE		8.664			Tidak Jadi
6.	Hatta		2.643			Tidak Jadi
7.	Kuryanto		1.185			Tidak Jadi

	Setia, R SE					
8.	Dadang Hermawan		2.532			Tidak Jadi
9.	Amanah, SH		3.722			Tidak Jadi
10.	Hj.Awingsih. S		2.918			Tidak Jadi
1.	Hj. Sophanah	II	11.469	41.425	2	Jadi
2.	Drs.Abdul Rojak Muslim		1.525			Jadi
3.	Badruddin (Jhon)		2.315			Jadi
4	Hj.Nani Ratnaningsih		622			Tidak Jadi
5.	Eni Sukaeni		1.260			Tidak Jadi
6.	Drs. H.Saimin Murkana MM		1.019			Tidak Jadi
7.	H Warka'I Sujud		127			Tidak Jadi
8.	M.Warpan Jaya Lelana		3.346			Tidak Jadi
1.	Ruyanto	III	2.690	73.544	4	Jadi
2.	Warmin Permana		1.885			Jadi
3.	Hais Lasimpala		3.507			Jadi
4.	Ahmad Nasiruzzaman		4.499			Jadi
5.	Masduki Nawawi		1.438			Tidak Jadi
6.	Mulyanto, BA		5.218			Tidak Jadi
7.	Ir. Sucipto		2.483			Tidak Jadi
8.	Abdulloh		1.468			Tidak Jadi
9.	Susendi Restu		714			Tidak Jadi
10.	Sonhadji Chariri		968			Tidak Jadi
11.	Sukarsih Suin Alias UU		7.694			Tidak Jadi
1.	H.Uryanto Hadi SH, SE	IV	4.832	52.085	3	Jadi
2.	H.urip		4.817			Jadi
3.	Casmita Hadi		2.019			Jadi
4.	Hj. Emi Jumiarsih, SE		14.603			Tidak Jadi

5.	Muhadi Suryana		765			Tidak Jadi
6.	Tambak Arifin		3.264			Tidak Jadi
1.	Drs. Soekarno E, MM	**V**	2.529	**56.444**	**3**	Jadi
2.	H.M.Hasyim Junaedi S,ag, M,ba		1.708			Jadi
3.	Ipik Fikriyah		7.014			Jadi
4.	H.Darwa Saputra, SH		3.158			Tidak Jadi
5.	Jeni Eryudin, SE		6.477			Tidak Jadi
6.	Dedi Setiawan Sastradinata		881			Tidak Jadi
7.	Supratiningsih		2.012			Tidak Jadi
8.	H.Rawita		1.517			Tidak Jadi
1.	Abdul Rahman	**VI**	3.310	**80.053**	**4**	Jadi
2.	Komaruddin		3.898			Jadi
3.	Atoillah Dalil		5.561			Jadi
4.	Aminah, S,ag		969			Jadi
5.	H.Sofwan Hidayat		3.131			Tidak Jadi
6.	Drs.Khairudin, MM		19.690			Tidak Jadi
7.	Darja		425			Tidak Jadi
8.	Rengsih, Amd		1.242			Tidak Jadi
9.	Jubaedah		2.847			Tidak Jadi
10.	Heri Kuswandi		2.066			Tidak Jadi
11.	Wasnata		1.728			Tidak Jadi

Sumber KPUD Indramayu

Dari data serta kajian lapangan yang diperoleh bahwa perolehan suara tidak ada perbedaan yang sangat mencolok , didaerah pemilihan I suara yang terbanyak adalah nomor 1. Begitupun pada daerah pemilihan II. Sedangkan untuk daerah pemilihan III walaupun jumlah perolehan suara nomor urut 1 lebih sedikit bila dibandingkan dengan nomor urut 11. Kemudian pada daerah pemilihan IV jumlah suara nomor urut 1 lebih sedikit bila dibandingkan dengan nomor utut 4. Lalu kemudian daerah

pemilihan V dengan nomor urut 1 perolehan suaranya lebih kecil bila dibandingkan dengan nomor urut 5. Sedangkan untuk daerah pemilihan VI calon anggota yang terpilih menjadi anggota legislative suaranya lebih kecil dari nomor urut 6.

Guna mengambil keputusan (kebijakan) partai menyerahkan ketentuan itu kepada undang-undang. Yaitu sesuai dengan bagian pembagi pemilih (BPP) yang ketetapannya disesuaikan dengan perolehan hasil suara tiap daerah pemilihannya masing-masing. Bukan ditentukan kesepakatan-kesepakatan internal partai, yang terjadi pada beberapa partai besar diIndramayu.

Dari suara partai Golkar pada daerah pemilihan I dengan BPP 20.521 sedangkan perolehan suara partai adalah 70.031 maka untuk nomor urut 1, 2, 3, dan 4 memenuhi ketentuan BPP maka secara otomatis terpilih.

Sedangkan untuk daerah pemilihan II dengan BPP 19.247 sedangkan suara yang diraih partai Golkar adalah 41.425 maka yang menjadi adalah nomor urut 1, dan 2.

Untuk daerah pemilihan III dengan perolehan suara yang diraih partai Golkar mencapai 73.544 sedangkan BPP nya 20.460 maka nomor urut 1, 2, 3, yang jadi.

Kemudian untuk daerah pemilihan IV dengan perolehan suara partai Golkar berjumlah 52.085 suara sedangkan untuk BPP 22.904 maka yang jadi adalah nomor urut 1, 2, da 3.

Untuk daerah pemilihan V dengan perolehan suara partai Golkar 56.444 sedangkan BPP nya 19.653 maka yang jadi adalah nomor urut 1, 2, dan 3.

Sedangkan untuk daerah pemilihan VI perolehan suara partai Golkar memperoleh 80.053 suara sedangkan BPP nya 20.601 maka yan jadi adalah nomor urut 1, 2, 3, dan 4.

Sedangkan untuk nomor urut sesudah nama yang jadi tidak harus selesai pada pemilihan legislatif saat itu juga. Tetapi sewaktu-waktu partai akan menggunakan haknya dalam meracal anggota dewan yang terpilih bila tidak mengindahkan garis partai. Atau bias jadi ditengah jalan ada pergantian bila sewaktu-waktu yang terpilih meninggal dunia atau mengundurkan diri.

Dari hasil kesepakatan itu serta nama-nama yang tidak terpilih saat ini khususnya partai Golkar tidak pernah memprotes apalagi sampai menggunakan massanya untuk berdemonstrasi. Dari laporan KPUD Indramayu bahwa setelah penetapan calon anggota legislatif terpilih seringkali KPUD Indramayu didatangi oleh simpatisan caleg yang kalah atau merasa dirugikan terutama oleh partai-partai besar.

Fenomena ini sebenarnya sejak lahirnya undang-undang pemilu No.12/2003 yang kontraversi terutama mengenai ketentuan nomor urut. Perolehan BPP terutama bagi nomor urut sepatu (terakhir) sangat sulit untuk mendekatinya. Ditambah dengan petunjuk pelaksana bahwa dengan

mencoblos tanda gambarnya saja suara syah, tetapi bila mencoblos nama calegnya saja tanpa mencoblos tanda gambar tidak syah.